

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :
FEBRINA ERLINDA NURYANTI
NPM. 0771010127

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul: ” Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Surabaya”.

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penyusunan Skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur..
3. Bapak Panggung Handoko S.Sos., S.H, MM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, S.H. M.Si selaku Dosen Pembimbing utama.
5. Ibu Mas Anienda , S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pembuatan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Sariyanto, S. Sos selaku Kepala Bagian Tata Usaha beserta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kedua orang tua tercinta, dan seluruh saudara-saudara yang telah memberikan dukungan moriil maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2007 dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penyusun harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Desember 2011

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Febrina Erlinda Nuryanti
NPM : 0771010127
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Februari 1990
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

ABSTRAKSI

Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah efek buruk pemidanaan terhadap perkembangan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, perbedaan pokok terletak pada pelakunya yaitu dilakukan oleh anak-anak. Tetapi batasan usianya biasanya dipergunakan terhadap tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal. Berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat kami sebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 16 tahun. Sanksi pidana dan tindakan yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya Pasal 23 dan Pasal 24 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kata Kunci : Anak Nakal, Sanksi Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diberlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga

perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengenai masalah anak. Tujuan dari Perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 3 bahwa, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya¹.

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman

¹Sumpramono Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000. h.158

pidana. Menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam pasal 1 butir ke 15 dalam Undang-undang Perlindungan anak juga menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian Pidana adalah Istilah “Hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena

istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena “Pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna setral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Dari definisi yang diperoleh, dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 23 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak) yang menentukan :

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal yaitu : Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

2) Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a) Pidana Penjara;
- b) Pidana Kurungan;
- c) Pidana Denda atau;
- d) Pidana Pengawasan

3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan ialah :

- a) Perampasan barang-barang tertentu
 - b) Pembayaran ganti rugi.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi pidana yang diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Fakta menunjukkan bahwa tipe kejahatan dalam masyarakat semakin bertambah. Jenis kejahatan semakin bertambah di samping semakin majunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di antara jenis kejahatan adalah kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Kedua jenis kejahatan ini sangat erat hubungannya satu sama lain karena pembunuhan hampir selalu didahului

dengan penganiayaan.² Pembahasan mengenai kejahatan terhadap tubuh tidak lepas dari rumusan-rumusan negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Maka, tindak penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh ini secara otomatis termasuk di dalam lingkup tindak pidana yang unsur-unsur dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya telah dimuat dalam KUHP buku II. Kejahatan terhadap “orang” dalam KUHP mencakup kehormatan (penghinaan), membuka rahasia, kebebasan/kemerdekaan pribadi, nyawa, tubuh/badan, harta benda/kekayaan. Namun pada umumnya, para pakar menggabung hal-hal tersebut menjadi tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh, yang dalam KUHP diatur dengan sistematis sebagai, kejahatan terhadap nyawa orang, penganiayaan, menyebabkan mati atau lukanya orang karena kesalahan/kelalaian.

Tindak pidana berupa penganiayaan atau bahkan menyebabkan kematian atau luka seseorang baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam KUHP.

² [http:// criminal law/ Tindak Pidana Terhadap Tubuh. com](http://criminallaw/tindakpidanaterhadap tubuh.com). 10 September 2011, 13.00

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di PN Surabaya?
2. Apakah faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di PN Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di PN Surabaya.
2. Mengetahui faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di PN Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam proposal ini adalah;

a. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

b. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Diharapkan mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas penerapan sanksi pidana terhadap anak nakal dalam tindak pidana penganiayaan.

b. Bagi instansi

Diharapkan dapat menggunakan Undang-undang yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak nakal dalam tindak pidana penganiayaan.

1.5 Kajian Pustaka

A. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berda dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.³

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 yaitu:

1. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana atau

³ Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Gramedia Wina Sarana, 2000, Hal 3

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

3. Anak Terlantar adalah :

Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan :

- a. Adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau
- b. Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.⁴

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUH Pidana) yaitu:

Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau di pidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.⁵

Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

⁴ Salam Faisal, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005, h.25

⁵ Supramono Gatot, Hukum Acara Peradilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2002

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu :

Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan anak.

Yang dimaksud dengan undang-undang kesejahteraan anak meliputi;

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

3) Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ayat 1 : memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali

- anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun
- pendewasaan

Ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.

B. Hak dan Kewajiban anak

Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak sebagai berikut;

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam melindungi hak anak, anak juga mempunyai kewajiban sebagai berikut;

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru serta yang lebih tua agar anak mempunyai budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti yang luhur mampu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua.
2. Menyayangi, mampu member kasih sayang dan melindungi adik, teman, dengan mencintai keluarga dan masyarakat.
3. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut atau yang sesuai bimbingan agama orang tua.
4. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁶

C. Jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak:

1. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun . Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 26 adalah:

⁶ Handout, Timoer Hartadie, Hukum Perlindungan Anak, h. 5

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
 - (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
 - (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
2. Pidana Kurungan adalah dinyatakan dalam pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang

melakukan tindak pidana paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

3. Pidana denda adalah seperti pidana penjara dan kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak paling banyak juga satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pidana denda menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997:

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

4. Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan lamanya paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun.

5. Pidana bersyarat

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun.

- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum adalah bahwa anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama tiga tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang lebih ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Permasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Permasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Permasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak;

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.⁷

D. Teori- Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori yaitu :

1. Teori absolut dan teori pembalasan, inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan atau berupa kejahatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.
2. Teori relatif dan teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk

⁷ Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.27

menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat terpelihara.

3. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan:

- a) Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada pembalasan yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.
- b) Teori gabungan yang kedua yang menitikberatkan pada tata tertib, pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti dan membikin tidak berdayanya penjahat.⁸

E. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.⁹

⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.5

⁹ Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 132

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas;
 - Penganiayaan biasa.
 - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
 - Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:
 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 5. Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
 6. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dari rumusan Pasal 351 KUHP di atas orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu sama dengan penganiayaan.

Dengan demikian, untuk menyebut orang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain orang itu harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Walaupun untuk dapat dipidana pelakunya akibat berupa rasa sakit pada orang lain harus benar-benar timbul.

Artinya;

Kesengajaan pelaku itu harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain. Di dalam surat dakwaan dipandang cukup jika orang menyebutnya dengan kata penganiayaan saja, karena kata penganiayaan itu juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya.

Prof. van Hattum dan Prof. Bemmelen mempunyai pendapat yakni:

- a. Bahwa setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain itu selalu merupakan suatu penganiayaan.
- b. Bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu merupakan suatu dasar yang meniadakan pelakunya, yakni bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tindakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan. Hanya saja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya yang dapat memperoleh pbenarannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan. Tindakan seperti itu dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.

Prof. Simons berpendapat bahwa:

Berdasarkan pengertiannya yang paling tepat mengenai kata penganiayaan dan sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, suatu tindakan yang mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain tidak dapat dipandang sebagai suatu penganiayaan, jika tindakan itu telah dilakukan dengan maksud untuk menyembuhkan kesehatan badan. Adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu sendiri tidak meniadakan sifatnya tindakan tersebut sebagai suatu penganiayaan. Akan tetapi jika tindakan-tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu sifatnya adalah demikian ringan dan dapat memperoleh pbenarannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka tindakan-tindakan tersebut dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.¹⁰

Menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu ialah perbuatan menimbulkan

¹⁰ Ibid h. 140

penyakit atau membuat penyakit yang diderita (orang lain) menjadi lebih berat. Dikatakan lebih lanjut bahwa tidak ada alasan untuk tidak memasukkan perbuatan menyebabkan terganggunya keadaan psikis orang lain ke dalam pengertiannya.

c. Penganiayaan ringan diatur oleh Pasal 352 KUHP

Hal ini diatur Pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut diatas itu dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut;

- a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu.

b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:

- 1) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri.
- 2) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara syah.
- 3) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia.

c. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

Kejahatan tersebut dalam Pasal 352 KUHP itu ialah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk pada terdakwa.

d. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP yang dirinci atas;

- Mengakibatkan luka berat.
- Mengakibatkan orangnya mati.

Hal ini diatur Pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,
- 3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Undang-undang sendiri ternyata telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan luka berat, akan tetapi dalam Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian masing-masing sebagai berikut;

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
 - c) Kehilangan salah satu panca indra.
 - d) Mendapat cacat berat.
 - e) Menderita sakit lumpuh.
 - f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
 - g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- e. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:

- Mengakibatkan luka berat.
- Mengakibatkan orangnya mati.
- a. Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut;
 - 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat meliputi;

- a) Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain.
- b) Ia menyadari bahwa orang lain pasti akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya, dan
- c) Ia menyadari bahwa orang lain mungkin akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya.

Artinya; Bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu percobaan penganiayaan berat disyaratkan, bahwa orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain, kemudian kesengajaan tersebut harus menjelma dalam suatu permulaan pelaksanaan dari suatu tindakan, yang seandainya tindakannya itu selesai dapat mendatangkan luka berat.

- f. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut;
 - Penganiayaan berat dan berencana
 - Penganiayaan berat dan berencana dan mengakibatkan orangnya mati.

Hal ini diatur dalam Pasal 355 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹¹

Unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Pelaku adalah seseorang yang berakal bahwa orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini mempunyai akal sehat.
- 2) Adanya niatan untuk melakukan penganiayaan adalah diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan dengan tenang, untuk itu sudah cukup pelaku berpikir sebentar untuk melakukan kejahatan.

1.6 Metodologi Penelitian

Tipe Penelitian skripsi ini adalah secara yuridis sosiologis, yaitu meneliti perundang-undangan dan kepustakaan di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah diatas.

¹¹ Leden Merpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 50

Penelitian hukum sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹²

A. Pendekatan Masalah

Skripsi ini dibuat dengan menggunakan pendekatan masalah secara case approach, yaitu dengan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai putusannya atau dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.¹³

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

¹² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 105

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal 119

- a. Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.
- c. Sumber Bahan Hukum Tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai tambahan pelengkap dari kedua bahan sebelumnya.

C. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menempuh penelitian ini adalah studi kepustakaan;

a. Studi Kepustakaan

adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁴

Dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surabaya dan mengumpulkan literatur hukum, yang dibahas.

¹⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Peneliti Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 101

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi lengkap.

Adapun prakteknya nanti penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pegawai dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

D. Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Surabaya yang berlokasi di Jalan Raya Arjuno No 16-18 Surabaya dengan pertimbangan karena Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur dengan tingkat kriminalitas tindak pidana yang lebih banyak. Selain itu Peneliti, juga mendapatkan kemudahan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

1.7 Sistematika Penulisan

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan supaya di dalam proses penyampaian materi dari skripsi ini dapat mudah dipahami. Sistematika

penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab Kesatu merupakan pendahuluan, yang berisi uraian dari tulisan ini yang bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bagian, sub yang pertama berisi tentang proses pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surabaya dan sub yang kedua berisi tentang pelaksanaan sanksi pidana dalam kasus anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab ketiga menjawab rumusan masalah yang kedua mengemukakan tentang apa saja yang menjadi faktor-faktor pertimbangan hakim yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Bab keempat merupakan bab penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan yang ada, yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.